

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 2017 ditandai sebagai krisis nuklir Semenanjung Korea yang terbaru, menurut *Lamont-Doherty Earth Observatory* tercatat gempa berkekuatan 6.3 skala richter yang dihasilkan oleh ledakan nuklir berkapasitas 250 kT (Krajick 2018). Ditambah lagi terdapat setidaknya 16 percobaan peluncuran rudal balistik selama 2017, yang mana menurut data peluncuran 28 November, rudal balistik Hwasong-15 memiliki daya jelajah terjauh dari semua rudal yang pernah diluncurkan Korea Utara mencapai 13.000 km atau bisa dikatakan akhirnya Kim Jong-un memiliki kemampuan untuk menyerang Washington, Amerika Serikat (Mark, Sang-Hun, Cooper 2017).

Namun, ada hal menarik yang terjadi selama tahun 2018 paska tingginya ketegangan di Semenanjung Korea, alih-alih bersikukuh untuk melanjutkan permusuhan, Korea Utara justru menghentikan kegiatan tes nuklirnya termasuk peluncuran rudal balistik dan cenderung bersikap terbuka untuk berkooperasi. Kim Jong-un memulai dengan berkunjung ke Tiongkok pada bulan Maret untuk bertemu Pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, Direktur Penghubung Internasional Song Tao, Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan anggota Politburo Partai Komunis Tiongkok. Kunjungan ini tercatat sebagai perjalanan internasional yang pertama semenjak tujuh tahun Kim Jong-un menjadi pemimpin Korea Utara (Hyun-Suk 2018).

Kemudian pada bulan April 2018, Kim Jong-un menyetujui diadakannya pertemuan Inter-Korea yang menghasilkan Deklarasi Panmunjom. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Kim Jong-un sepakat untuk melaksanakan tiga hal: Mempromosikan kesejahteraan bersama dan penyatuan kembali Korea melalui peningkatan dan pengembangan hubungan antar-Korea, Penghapusan ketegangan militer dan risiko perang secara substansial, serta Membangun rezim perdamaian semenanjung Korea yang permanen (Kyodo 2017). Paska pertemuan, Kim Jong-un menghentikan kampanye balon propagandanya, mesinergikan kembali zona waktu dengan Korea Selatan, bahkan saat Presiden

Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak berwacana membatalkan pertemuan di bulan Juni, Kim Jong-un langsung berinisiatif untuk mengadakan pertemuan inter-Korea kedua di tahun 2018 untuk meminta bantuan Moon Jae-in menyampaikan pesan ke Washington. Alhasil pertemuan dengan Amerika Serikat tetap berlangsung di Singapura (CNBC 2018; SCMP 2018).

Paska pertemuan dengan Amerika Serikat di Singapura, Kim Jong-un melakukan Moratorium untuk uji coba rudal dan nuklir, membongkar fasilitas uji coba atom dan peluncuran satelit Sohae, menonaktifkan fasilitas perakitan rudal balistik antarbenua dekat Pyongyang, mengembalikan sisa-sisa 55 Tentara Amerika Serikat yang terbunuh dalam Perang Korea, menghilangkan propaganda domestik anti-Amerika Serikat, dan Membebaskan tiga warga negara Amerika Serikat ditangkap dan dipenjara di Korea Utara. Di lain pihak, dengan diadakannya pertemuan ketiga inter-Korea pada bulan September 2018, Kim Jong-un menandatangani CMA sebagai bentuk konkret perwujudan deklarasi Panmunjom. Perjanjian tersebut mulai diwujudkan dengan pembersihan ranjau di daerah *joint security* pada zona demiliterisasi dan pencarian sisa-sisa tentara Perang Korea, pembongkaran pos penjagaan dan struktur bawah tanahnya, pelucutan senjata dan penarikan personel militer diganti dengan penjaga keamanan tak bersenjata, pembukaan kembali kantor penghubung inter-Korea, serta menetapkan zona penyangga, larangan terbang, dan perdamaian.

Jika ditilik kebelakang, ancaman nuklir dari Korea Utara merupakan fenomena yang relatif baru, bertolak dari tes bom nuklir pertamanya di tahun 2006, negara ini terkenal memiliki ambisi yang besar untuk mengembangkan senjata nuklir serta ICBM sebagai sarana penghantar hulu ledaknya. Ambisi ini diteruskan turun temurun dari pemimpin generasi pertama Kim Il-sung sampai saat ini dibawah kepemimpinan Kim Jong-un, meskipun secara kapasitas ekonomi, Produk Domestik Bruto per kapita Korea Utara hanya 1.700 USD dengan pertumbuhan rata-rata -1.1% (CIA Factbook 2015).

Pada tahun 2012 tepatnya di pertemuan ke-12 Majelis Rakyat Tertinggi atau hanya setahun semenjak Kim Jong-un menjadi pemimpin tertinggi

menggantikan ayahnya Kim Jong-il yang meninggal pada tahun 2011, Korea Utara mengamandemen konstitusinya dan memproklamasikan diri sebagai penyandang status negara berkekuatan nuklir (Kwon 2018, 404). Selain itu, Pyongyang menegaskan pengadopsian konsepsi *Byungjin*, sebuah pemikiran strategis baru yang memadukan konstruksi ekonomi dan pembentukan angkatan bersenjata nuklir secara bersamaan. Alhasil, Pyongyang berfokus pada pengembangan kemampuan serangan preventif atau *1st strike* dan serangan balik atau *2nd strike* yang kemudian menjadi kegentingan di Semenanjung Korea dikenal sebagai Krisis Korea 2013 (Mullen 2013; Lawrence & Carter 2013).

Tercatat oleh *Federal Institute for Geosciences and Natural Resources* pada 12 Februari 2013 terdapat gempa berkekuatan 5,1 skala richter yang dihasilkan oleh ledakan nuklir berkapasitas 14 kT dari Punggye-ri fasilitas tes nuklir Korea Utara (BGR 2013). Meskipun mendapatkan kecaman dunia internasional serta sanksi yang lebih keras dari Dewan Keamanan PBB sebagaimana tertera pada Resolusi 2087 dan 2094 yang mengharuskan negara-negara menginspeksi kargo dari dan menuju Korea Utara, serta melarang transfer uang yang ditujukan untuk mengucilkan Korea Utara dari sistem finansial internasional, Kim Jong-un justru mengabaikannya dengan melaksanakan lima tes rudal pada bulan Mei yang tiga diantaranya merupakan peluru kendali jarak pendek dijatuhkan di Laut Jepang (BBC 2017; Spark-Smith 2013).

Kegigihan Korea Utara dalam mendapatkan predikat negara berkekuatan nuklir terus terefleksi dari tes bom nuklir dan rudal balistik di tahun berikutnya. Pada tahun 2016 tercatat dua ledakan, menurut estimasi *University of Science and Technology of China* masing-masing berkapasitas 16,5 kT dan 17,8 kT yang diklaim Korea Utara sebagai bom hidrogen pertama mereka dan hulu ledaknya berhasil dipasang pada sebuah rudal (Lianxing Wen's Geogroup 2016a; 2016b). Hal ini diikuti oleh setidaknya sepuluh percobaan terpisah peluncuran rudal balistik mulai dari tipe Taepodong, Unha, Kwangmyŏngsŏng, sampai Pukkuksong yang diklaim dapat mencapai Guam, pangkalan militer Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB kembali merespon dengan

Resolusi 2270 dan 2321 yang melarang ekspor emas, vanadium, titanium, besi, batubara, tembaga, nikel, seng, perak dan logam langka lainnya.

Seperti yang dijelaskan John Delury (2016) dan Kwon (2018, 409) sanksi berat terbukti tidak efektif dalam menghadapi Korea Utara yang telah menjalani banyak sanksi dari komunitas internasional selama dekade terakhir. Secara umum karena Pyongyang dapat dengan mudah mencari importir alternatif untuk tetap menjual barang eksportnya dan berbisnis. Sementara untuk sanksi yang menarget individu atau perusahaan, Pyongyang hanya perlu mengganti nama perusahaan atau identitas individu tersebut. Dalam konteks ini Tiongkok memiliki peran penting, sudah sejak lama perusahaan dagang milik Korea Utara yang dikelola dan didukung oleh tentara, partai buruh, dan kabinet membentuk jaringan bisnis ilegal. Melalui perantara dari beberapa perusahaan bisnis swasta di Tiongkok, Pyongyang membeli bagian mesin utama dari rudal dan senjata nuklir. Ditambah harga komoditas batu bara yang sedang naik memungkinkan Korea Utara justru menghasilkan lebih banyak pendapatan.

Bukti konkret tidak efektifnya sanksi adalah terjadinya serangkaian tes nuklir di tahun berikutnya yang dikenal sebagai Krisis Korea 2017. Seperti krisis sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi sebagai respon melalui Resolusi 2371, 2375, dan 2397 yang melarang semua ekspor-impor timah, makanan laut, minyak mentah dan olahan, tekstil, kondensat dan cairan gas alam, kayu, mesin, kendaraan transportasi serta pembekuan aset pejabat Kementerian Angkatan Bersenjata dan Perbankan yang diikuti pelarangan warga negara Korea Utara untuk bekerja di luar negeri. Namun, seperti yang sudah dijelaskan diatas, mempertimbangkan mudahnya Korea Utara untuk menghindari sanksi dengan praktek bisnis ilegalnya, serta keuntungan strategis dari kepemilikan senjata nuklir yang mampu menyerang Washington, pada tahun 2018 Korea Utara justru bersikap 180° dan memulai perundingan damai.

## 1.2 Rumusan Masalah

Apa yang menjadi latar belakang Kim Jong-un bersikap relatif terbuka yang ditandai oleh pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara adidaya membahas denuklirisasi, normalisasi hubungan dengan Korea Selatan, serta menghancurkan beberapa fasilitas rudal dan nuklir setelah tujuh tahun memimpin Korea Utara secara *hostile*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi latar belakang Kim Jong-un bertemu dengan pemimpin negara adidaya seperti Tiongkok dan Amerika Serikat menandai dimulainya perjanjian damai, serta menilik faktor apa yang berpengaruh sehingga pada tahun 2018 Kim Jong-un berubah sikap menjadi relatif lebih kooperatif.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Selayang Pandang Korea Utara

Korea Utara adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Timur dan berada di posisi utara Semenanjung Korea. Negara ini berbatasan langsung dengan Korea Selatan yang awalnya adalah satu wilayah. Secara demografis, masyarakat Korea Utara masih satu rumpun dengan masyarakat Korea Selatan dan Asia Timur, yaitu masih satu ras mongoloid. Di dalam masyarakat Korea Utara, uniknya meski dikenal sebagai negara penganut Sosialisme dan Komunisme, namun kenyataannya di negara ini diterapkan sistem kelas. Sistem kelas di Korea Utara terdiri dari tiga golongan yaitu *core*, *wavering*, dan *hostile*. Core adalah kelas yang 30% menguasai populasi Korea Utara. Kelas ini berisikan kelompok pekerja kota, anggota Partai Komunis, dan mereka yang berkontribusi bagi Partai Komunis. Kelas hostile merupakan kelas bagi pemilik tanah, kelompok agama Kristen, mereka yang berhubungan dengan Jepang, dan golongan yang berlawanan dengan pemerintah. Kelas ini yang paling banyak teralienasi dari hak-hak mereka sebagai warga negara. Sementara itu kelas *wavering* diperuntukkan bagi golongan menengah antara kelas *core* dan *hostile*. Kemudian, secara ekonomi, Korea Utara merupakan negara yang masih dikategorikan sebagai negara berkembang namun memiliki industri berat yang dominan (Seth 2011, 362).

Secara historis, Korea Utara mengalami partisi dengan Korea Selatan. Ini adalah dampak dari Perang Korea dan Perang Dingin di tahun 1948. Perang Korea menyebabkan Semenanjung Korea terbelah menjadi dua. Sejak terpartisi ini keduanya menjadi negara yang saling curiga satu sama lain. Korea Utara dan Korea Selatan memiliki perbedaan yang cukup kontras satu sama lain. Awalnya Korea Utara berkembang lebih maju dibanding Korea Selatan karena memiliki program rekonstruksi ekonomi dan industrialisasi yang lebih baik dibanding Korea Selatan, sementara Korea Selatan di awal berdirinya masih tergolong miskin dan begitu tergantung pada Amerika Serikat (Seth 2011, 340). Namun seiring dengan berjalannya waktu, keadaan menjadi berbalik. Korea Utara kini tengah mengalami stagnasi sementara Korea Selatan tengah mencapai kemakmuran. Sebagai legasi dari Perang Dingin, Korea Utara begitu tergantung pada Uni Soviet dan Tiongkok sebagai sesame penganut ideologi Sosialisme/Komunisme. Sosialisme di Korea Utara memiliki kemiripan karakter dengan yang ada di Uni Soviet dan Tiongkok yang mana peranan negara begitu sentral dalam menciptakan kestabilan karena di mata pemimpin Korea Utara kestabilan hanya bisa dicapai lewat tangan besi, maka kediktatoran menjadi konsekuensi logisnya.

Dalam orientasi ekonominya, Korea Utara lebih berfokus pada sektor industri berat dan *self-sufficiency* (Seth 2011, 340). Namun alih-alih dipergunakan untuk pembangunan, 30% hasil sektor ekonomi justru dialokasikan pada sektor pertahanan (Seth 2011, 365). Kim Il Sung sebagai bapak pendiri bangsa, meyakini bahwa dengan membangun industri pada sektor material berat seperti militer akan membangkitkan perekonomian negara dan sekaligus memperkuat militernya (Seth 2011, 342). Keputusan ini juga disebabkan karena persepsi ancaman dari Korea Selatan yang berbeda haluan ideologis. Selain itu, Korea Utara juga lebih banyak berorientasi pada pemenuhan domestiknya daripada mengeksport produk ke luar negeri yang menyebabkan negara ini menjadi salah satu negara isolasionis di dunia (Seth 2011, 340).

Kemiskinan dan pelanggaran HAM merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Korea Utara. Seringkali kediktatoran menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Bennet & Lind

(2011, 84) bahwa otoritarian Korea Utara merepresi populasi dan mempertahankan kekuatan selama bertahun-tahun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tindakan penguasa Korea Utara yang kemudian memunculkan kemiskinan dan pelanggaran HAM. Pertama, pemerintahan Korea Utara memanfaatkan dana masyarakat untuk pemborosan pada hal-hal yang tidak penting. Korea Utara senang merayakan hari kelahiran pemimpinnya dengan pesta atau pembangunan patung atau monumen. Proyek seperti ini memakan biaya besar dari masyarakat dan negara. Contohnya adalah di perayaan ulang tahun Kim Il-sung yang ke 60 tahun, Korea Utara membangun bangunan semacam Arc of Triumph yang menyedot anggaran besar yang seharusnya dapat dialihkan dananya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan atau untuk memenuhi kebutuhan domestik (Seth, 2011 : 359).

Kedua, kemiskinan di Korea Utara disebabkan oleh keputusan pemerintah pusat untuk menjadi negara tertutup. Di awal berdiri negara ini telah memutuskan menjadi negara yang *self-reliance* dan semakin menjadi isolasionis seiring dengan kecurigaan Korea Utara pada Uni Soviet dan Tiongkok. Oleh sebab itu mereka memilih untuk tidak menerima bantuan dari luar dan menjadi negara independen (Chung 2004, 288). Korea Utara kemudian hanya bergantung pada industri alat-alat berat seperti kemiliteran saja. Implikasi dari aksi seperti ini dan isolasionis Korea Utara adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya Korea Utara sudah rapuh di awal karena tidak dapat secara terus menerus menggantungkan pada satu sektor industri. Isolasionis Korea Utara ini juga tidak memungkinkan pemasukan dari sektor non-militer ke dalam negeri.

Ketiga adalah pemusatan segala sesuatu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat Korea Utara yang menentukan produksi barang apa yang seharusnya dilakukan oleh negara itu. Mereka pula yang akan mendistribusikan hasilnya pada masyarakat luas. Permasalahannya adalah pemerintah pusat lebih suka memproduksi alat-alat militer yang sebenarnya kurang menjual di mata internasional. Tidak ada ruang bagi bisnis privat dan agrikultur (Seth 2011, 340-1). Pemerintah Korea Utara kurang tertarik dalam mengembangkan sektor ekonomi yang lebih menjual seperti pertanian misalnya. Selain itu, keputusan

pemerintah pusat yang lebih berfokus pada pertahanan dan militer menyebabkan pengeluaran negara lebih banyak dihabiskan untuk belanja alutsista dan peningkatan kualitas pasukan militer, termasuk juga untuk pengembangan nuklir Korea Utara. Tidak hanya itu, Korea Utara juga bahkan mengembangkan senjata biologis yang sebenarnya tidak penting dan mendesak di banding aspek kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Seth 2011, 355). Oleh sebab itu hanya sebagian kecil dari hasil pendapatan negara dan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat di Korea Utara. Akibatnya kemiskinan menjadi permasalahan yang tetap dihadapi oleh negara ini.

Keempat, pemerintah Korea Utara di bawah Kim Il-sung menetapkan *blue print* yang berdasarkan pada *juche*. *Juche* adalah paham *self-reliance* yang menekankan pada kemandirian politik, ekonomi, serta nasionalisme Korea (Seth 2011, 355). Paham ini diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Kim Il-sung yang cenderung ultranasionalis dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan di Korea Utara. Akibatnya segala kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat dianggap benar karena didasarkan pada doktrin *juche* ini. Karena dukungan doktrin ini yang kemudian melanggengkan kekuasaan pemerintahan Korea Utara, maka pemerintahan diisi oleh orang-orang tidak berkompoten (Chung 2004, 289).

Dampaknya adalah kebijakan yang dihasilkan tidak banyak berpihak pada pengentasan kemiskinan. Program-program yang dirancang hanya didasarkan pada kemauan pemerintah pusat yang sebenarnya hanya untuk memenuhi ambisi elit tersebut. Salah satunya adalah Ch'ollima Movement di tahun 1956 (Seth 2011, 343). Gerakan ini digagas oleh Kim Il-sung dengan datang ke industri untuk mendorong semangat para pekerjanya. Ironisnya para pekerja ini harus bekerja selama berjam-jam dengan mengerjakan kebutuhan produksi industri berat. Dampaknya kemudian adalah masyarakat menjadi berkurang kreativitasnya, teralienasi, dan hak untuk hidup juga tereduksi dengan sistem kerja yang demikian ini.



#### 1.4.2 Upaya Menjelaskan Kepentingan Nuklir Korea Utara

Penjelasan tentang mengapa Korea Utara berkepentingan memiliki nuklir terbagi dua, pandangan optimistis berargumen bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Korea Selatan yang mengancam secara militer, mengisolasi secara politik dan menyakitkan secara ekonomi, mendorong Pyongyang untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai tindakan perlawanan. Oleh karena itu menurut pandangan ini jika komunitas internasional bisa menjamin keamanan, mengajak secara politis, membantu perkembangan ekonomi, Korea Utara akan kehilangan alasan untuk meneruskan program nuklirnya (Anderson 2017, 3).

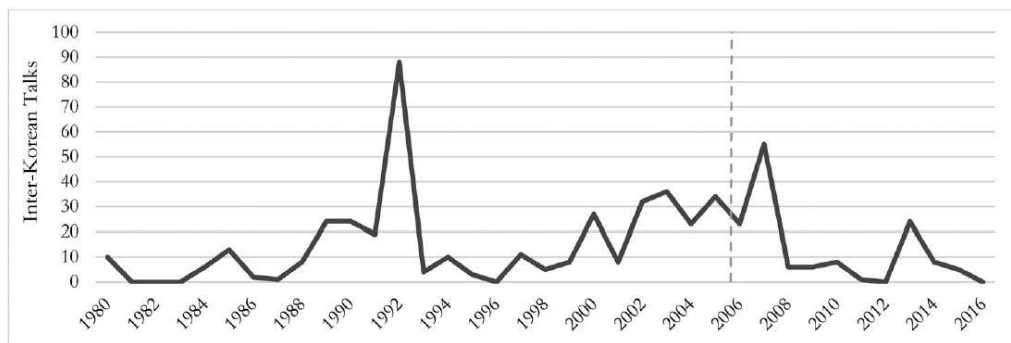
Sementara pandangan pesimistis berargumen bahwa faktor internal rezim Korea Utara seperti kecenderungan psikologis pemimpinnya yang secara inheren menginginkan senjata nuklir, menggunakannya sebagai alat pemeras bantuan internasional, dan memiliki dorongan revisionis terhadap tatanan global. Oleh karena itu menurut pandangan ini menurunkan tekanan militer hanya akan menguntungkan Korea Utara, bantuan ekonomi hanya akan membantu pembiayaan program nuklirnya, dan pelibatan secara politis tidak akan membuat Pyongyang meninggalkan program nuklirnya (Anderson 2017, 3).

Menurut Anderson (2017, 3-4) kedua pandangan di atas hanya sebagian benar dan sebagian lagi salah. Pandangan optimistis misalnya, benar dalam menunjukkan bahwa program nuklir Korea Utara ditujukan untuk memastikan keamanan eksternal, namun salah dalam mengklaim jaminan keamanan yang negatif dari Amerika Serikat sebagai jawaban atas kekhawatiran keamanan Pyongyang. Sementara pandangan pesimistis, benar dalam menggambarkan Korea Utara tidak akan meninggalkan program nuklirnya, namun salah dalam mengidentifikasi insentif Korea Utara tetap melanjutkan program nuklirnya yang dikatakan bersifat internal.

Ditelaah lebih jauh oleh Anderson sebagai berikut, pertama tentang jaminan keamanan, sejak tahun 1989 sampai tahun 2011 Presiden Amerika Serikat seperti Bill Clinton, George W. Bush (pada masa jabatan kedua), dan Barack Obama sudah menawarkan hal tersebut sebanyak 33 kali atau sekitar dua

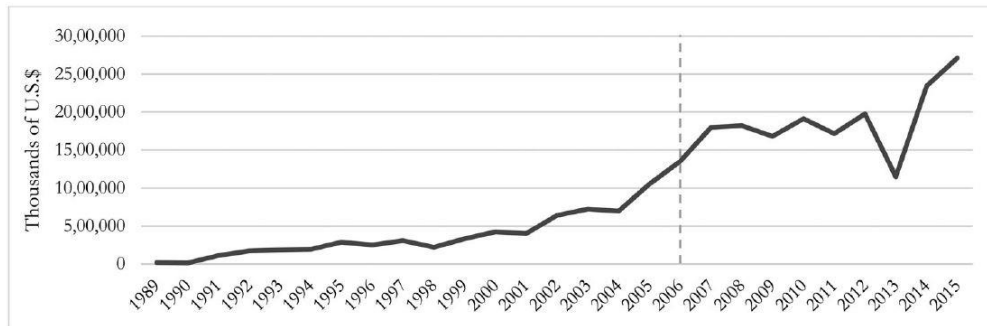
tawaran setiap tiga tahun disamping menghentikan latihan militer Amerika Serikat-Korea Selatan. Namun ternyata penurunan ancaman militer atau mengekspresikan niat baik tidak membuat Korea Utara meninggalkan program nuklirnya (Anderson 2017, 5-6).

Kedua tentang isolasi politik, dari tahun 1980 sampai 2002 jumlah dialog antar Korea mencapai paling sedikit 11 kali setiap tahun, sementara keterlibatan politis dengan Amerika Serikat juga terjadi beberapa kali seperti AF tahun 1994 sampai 2001 dibawah administrasi Clinton, dan SPT dibawah administrasi Bush. Kenyataannya, Korea Utara tetap saja menjalankan program rudal balistik dan nuklir uraniumnya di tahun-tahun tersebut dan membuat kemajuan yang signifikan (Anderson 2017, 6-7).



**Grafik 1.1.** Inter-Korean talks, 1980-2016

Ketiga tentang kesempatan pengembangan ekonomi, terdapat dua cara dalam menilik sektor ekonomi, yaitu dengan melihat volume perdagangan antar Korea dan jumlah bantuan internasional. Data menunjukkan perdagangan antar Korea semakin naik setiap tahun, secara khusus mulai tahun 2003 kenaikannya sangat drastis. Begitu juga dengan bantuan dari *World Food Programme* yang mencapai 710.000 m<sup>3</sup> setiap tahun dengan tahun 1997 sampai 2005 secara khusus sebagai periode dengan bantuan terbanyak. Namun ternyata pada tahun 2006 Korea Utara justru melakukan tes bom nuklir pertamanya, menunjukkan bahwa kesempatan pengembangan ekonomi tidak membuat Pyongyang meninggalkan program nuklirnya (Anderson 2017, 7).



**Grafik 1.2.** Inter-Korean trade, 1989-2015

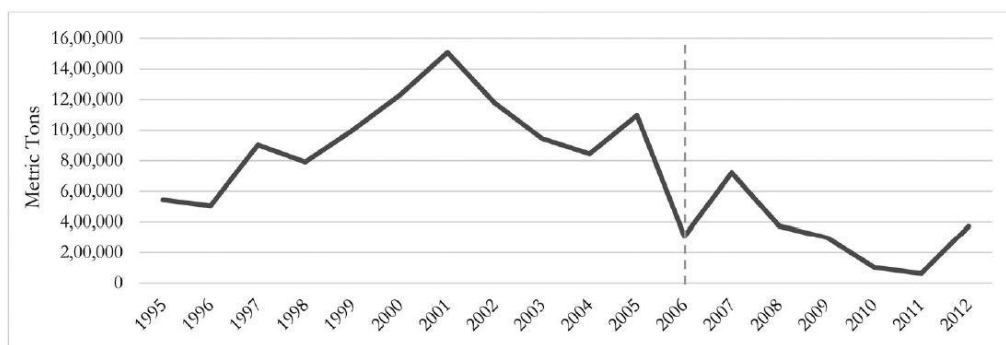
Keempat tentang kecenderungan psikologis pemimpin Korea Utara dalam kebijakan nuklir, era Kim Il-sung berfokus pada bom plutonium dan secara politik luar negeri lebih terbuka dibanding kepemimpinan anaknya ditunjukkan dengan penandatanganan *Agreed Framework 1994*. Era Kim Jong-il terkenal dengan kebijakan *songun* yang memprioritaskan seluruh sumberdaya Korea Utara ke ranah militer dengan bom uranium sebagai fokusnya. Sementara era Kim Jong-un terlihat sebagai kontinuitas dari program ayahnya. Jika program nuklir Korea Utara memang didorong oleh kecenderungan psikologis pemimpinnya seharusnya terdapat variasi atas kebijakan nuklir Korea Utara, namun kenyataannya di setiap era yang terjadi adalah keberlanjutan akuisisi nuklir yang mencerminkan peningkatan kecanggihan teknologi (Anderson 2017, 8-9).

Tipe	Tanggal	Evaluasi
Senjata Nuklir	12 Febuari 2013 (Tes ke-3)	6-7 kilotons
	6 Januari 2016 (Tes ke-4)	6-7 kilotons Bom Hidrogen
	9 September 2016 (Tes ke-5)	Kurang dari 10 kilotons
	3 September 2017 (Tes ke-6)	50-100 kilotons
Rudal balistik jarak jauh	13 April 2012 (Unha-3)	Gagal
	12 Desember 2012 (Unha-3)	Berhasil; meluncurkan satelit
	7 Febuari 2016 (Kwangmyungsung-4)	Berhasil; meluncurkan satelit
	4 July 2017	Terbang 933 km, ketinggian 2807 km
	28 July 2017	Terbang 998 km, ketinggian 3724 km
	28 November 2017	3724 km

		Terbang 960 km, ketinggian 4000 km
Rudal balistik kapal selam	9 Mei 2015	Berhasil
	28 November 2015	Gagal
	21 Desember 2015	Berhasil
	23 April 2016	Berhasil; terbang sejauh 30 km
	24 Agustus 2016	Berhasil; terbang sejauh 500 km

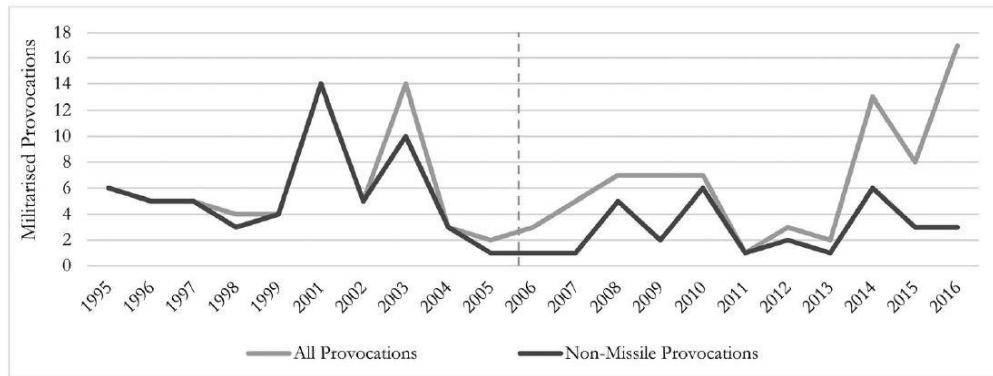
**Tabel 1.1.** Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara (Kwon 2018)

Kelima tentang nuklir sebagai alat pemeras bantuan internasional, sebagaimana terlihat dari tabel 1.1 bantuan internasional seperti makanan mengalami kenaikan hanya pada tahun 1995-2001 sesuai dengan bencana kelaparan Korea Utara di tahun 1990an, namun mengalami penurunan secara stabil sejak 2002 dan seterusnya. Kepemilikan senjata nuklir sejak tahun 2006 tidak membuat komunitas internasional memberikan lebih banyak bantuan, oleh karena itu argumen nuklir sebagai alat pemeras bantuan internasional tidak valid (Anderson 2017, 9).



**Grafik 1.3.** World Food Programme Aid, 1995-2012

Keenam tentang niat revisionis untuk mengubah tatanan global, jika Korea Utara memang negara yang ingin mengubah tatanan global atau revisionis maka setelah mendapatkan senjata nuklir akan lebih agresif dan asertif. Namun kenyataannya provokasi militer sebelum dan sesudah Korea Utara mendapatkan bom nuklir di tahun 2006 menunjukkan jumlah yang relatif sama tingginya. Oleh karena itu dorongan revisionis bukanlah alasan kuat mengapa Korea Utara mengejar program nuklirnya (Anderson 2017, 9-10).



**Grafik 1.4.** North Korea's Militarized Provocations, 1995-2016

Pada saat variasi aksi dari aktor-aktor tidak sesuai dengan variasi hasil, Kenneth Waltz (dalam Anderson 2017, 11) mengingatkan berarti ada faktor sistemik yang berperan. Sesuai dengan kasus Korea Utara, variasi agen dan strategi tampak tidak berpengaruh dalam ambisi nuklir Korea Utara mengisyaratkan terdapat kekuatan struktural. Menurut Anderson (2017, 12) motivasi utama program nuklir Korea Utara adalah kehadiran kekuatan unipolar global Amerika Serikat di semenanjung Korea dan aliansinya dengan rival Korea Utara yaitu Korea Selatan. Singkatnya, secara esensi berbatasan dengan negara paling kuat di sejarah modern mendorong Korea Utara untuk memperoleh, mempertahankan, dan memajukan program nuklirnya. Di lain pihak, kebijakan luar negeri spesifik dari Amerika Serikat dan niat inheren rezim Korea Utara tidak diragukan memainkan peran penting, namun bukanlah yang utama dibandingkan dengan keunggulan asimetris dari kemampuan militer yang dimiliki Amerika Serikat dan posisi geografis atas pengerahan pasukan di perbatasan selatan Korea Utara.

### 1.4.3 Sistem Internasional Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Negara

Menurut Henrikson (2002, 437) sistem adalah serangkaian unit, obyek atau bagian-bagian yang disatukan oleh bentuk interaksi satu sama lain. Kaitannya dengan tingkat analisis sistem internasional, yang dimaksud unit disini adalah negara sedangkan sistem internasional yang termasuk dalam variabel internasional mengacu pada lingkungan eksternal tempat sebuah negara berinteraksi dengan negara lain, oleh karena itu sifatnya eksogen. Bagi seorang pembuat kebijakan, lingkungan internasional merupakan aspek yang penting untuk diperhitungkan karena lingkungan internasional membatasi pilihan kebijakan yang realistis tersedia, kemungkinannya hanya dua, batasan ini menjadi hambatan atau peluang bergantung bagaimana pembuat kebijakan mempersepsikannya (Breuning 2007, 141).

Perbedaan antara variabel domestik dan variabel internasional terletak pada variabel pendorongnya. Variabel domestik mengacu pada aspek-aspek internal negara tempat proses dinamika domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri berlangsung, oleh karena itu sifatnya endogen, berbeda dengan variabel internasional yang eksogen. Perbedaan sumber dorongan ini dicontohkan Breuning (2007, 146) dengan negara Belanda dan Belgia, keduanya memiliki kapabilitas ekonomi dan militer yang sangat mumpuni, karena kapabilitas nasional tersebut seharusnya Belanda dan Belgia sangat aktif dalam isu-isu yang melibatkan militer karena mereka mampu, namun kenyataannya tidak, karena keduanya berada di tengah-tengah negara yang demokratis dan terikat dengan rezim Uni Eropa yang memaksa mereka menerapkan norma-norma yang demokratis pula.

Pengaruh sistem internasional terhadap kebijakan luar negeri dapat diidentifikasi melalui ketergantungan dan eksistensi negara dalam organisasi internasional, yang mana terdapat 4 kondisi yaitu *consensus-oriented*, *compliant*, *counter dependent*, dan *compensation foreign policy* (Breuning 2007, 152). Keempat kondisi ini didasarkan pada pengkategorian kapabilitas negara apakah negara tersebut superpower memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer yang kuat sehingga bisa memberi pengaruh dalam skala global, atautkah negara tersebut emerging power, middle power, small power

(East 1973, 559). Pertama dalam kondisi *consensus-oriented foreign policy*, terjadi ketika negara yang lemah secara sukarela beraliansi dengan negara yang lebih kuat secara kapabilitas untuk memberi pengaruhnya terhadap negara yang lebih lemah yang mana hubungan sukarela ini kemudian mempengaruhi haluan kebijakan luar negeri negara lemah tersebut. Kedua dalam kondisi *compliant foreign policy*, sama dengan kondisi pertama namun bedanya kedua negara berhubungan dengan dasar paksaan, negara kuat memaksakan pengaruhnya terhadap negara yang lebih lemah. Ketiga dalam kondisi *counter dependent foreign policy*, terjadi ketika pemimpin negara lemah menyadari ketergantungan yang besar terhadap negara kuat, sehingga melakukan tindakan untuk mereduksi ketergantungan tersebut yang mengundang ketidaksenangan negara kuat di dalam prosesnya. Keempat dalam kondisi *compensation foreign policy*, terjadi ketika negara kuat dikonstruksikan sebagai aktor antagonis oleh negara lemah dengan tujuan memuaskan domestik negara lemah tersebut (Breuning 2007, 152).

Terdapat 4 cara dalam menggunakan tingkat analisis sistem internasional, pertama melalui pendekatan *homo economicus view of international system*, menurut pandangan ini negara sebagai aktor non-uniter akan selalu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat dari hubungan internasionalnya baik kekuatan ekonomi atau militernya, jadi scope yang diamati adalah upaya negara dalam menambah kekuatannya, tercermin dalam kebijakan luar negerinya. Kedua melalui pendekatan *power, interdependence*, dan *norms*, menggambarkan bahwa ketiga elemen tersebut dimiliki dalam sistem internasional yang oleh karenanya negara memperoleh pengaruh dari ketiga bentuk tersebut. Contoh NATO yang memaksa Ceko untuk mengadopsi nilai-nilai demokratis di masa transisinya, memanfaatkan ketergantungan Ceko pada NATO akan keamanan dan keterikatannya dalam norma dan aturan dalam NATO. Ketiga melalui pendekatan *web of social interaction*, dianalogikan seperti manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya, sistem internasional diibaratkan lingkungan tempat negara berinteraksi yang mana proses interaksi ini mempengaruhi negara untuk mengadopsi kebijakan luar negeri tertentu. Contoh dalam interaksi negara-negara ASEAN yang akhirnya

merumuskan kebijakan luar negeri yang damai dan non-intervensi diantara negara-negara anggota. Keempat melalui pendekatan *international system as a story*, menerangkan bahwa sistem internasional adalah metafora, di dalam arti sistem internasional berisi bahasa, simbol, penampilan, dan bentuk-bentuk representasi lainnya yang mana jika diekspos pada negara akan mempengaruhi cara pandang yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negerinya (Tamaki 2015, 2-22). Contoh konkrit metafora ini terlihat pada *Bush Doctrine* yang memelopori *War on Terror*, nilai ini diadopsi menjadi kebijakan hampir seluruh negara di dunia.

#### 1.4.4 Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Variabel Sistemik

Amerika Serikat sudah menempatkan pasukannya di Semenanjung Korea sejak Perang Dunia II dan beraliansi dengan Korea Selatan sejak tahun 1953, secara umum Amerika Serikat memiliki kehadiran yang konstan. Dapat dikatakan Amerika Serikat sudah menjadi bagian dari “lingkungan” yang membentuk sikap Korea Utara, seberapa pentingnya Amerika Serikat bisa dilihat dari dilema penarikan pasukan dan denuklirisasi. Amerika Serikat tidak bisa memiliki kehadiran militer yang kuat di Semenanjung Korea dan berharap dapat mendenuklirisasi Korea Utara secara bersamaan, Washington harus memilih. Akan tetapi dilemanya, penarikan pasukan dan penghentian aliansi dengan Korea Selatan beresiko melancarkan upaya reunifikasi oleh Korea Utara menggunakan agresi militer (Anderson 2017, 12-4). Hal ini jelas menunjukkan Amerika Serikat merupakan variabel sistemik yang penting.

Dalam merespon tantangan instabilitas dari Korea Utara seperti ekonomi yang lemah dan pengembangan senjata nuklir, Tiongkok merupakan negara yang berandil besar dengan strategi persuasi diplomatik, interaksi ekonomi dan sanksi ekonomi moderat (Kong 2017, 1). Terutama sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 yang menandai semakin eratnya hubungan Tiongkok dan Korea Utara, sampai batas tertentu Tiongkok membawa tren reformasi pasar terhadap Korea Utara dengan aktivitas perdagangannya. Namun justru hal tersebut menjadi sumber finansial utama bagi Pyongyang untuk meneruskan program nuklirnya (Kong 2017, 16). Dalam konteks tersebut, bisa dikatakan Tiongkok



merupakan bagian dari “lingkungan” atau variabel sistemik yang juga berperan penting dalam membentuk sikap Korea Utara.

## **1.5 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis memiliki argumentasi bahwa Kim Jong-un berubah sikap karena terdapat tekanan eksternal atau sistemik secara khusus Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebabkan tindakan-tindakan Korea Utara selama tahun 2018 cenderung lebih kooperatif.

## **1.6 Definisi Operasional**

### **1.6.1 Pengaruh Amerika Serikat dan Tiongkok**

Pengaruh yang dimaksud penulis disini adalah kebijakan luar negeri kedua negara dalam berinteraksi dengan Korea Utara, bisa dalam bentuk tekanan yang koersif seperti sanksi dan operasi militer, atau insentif seperti bantuan ekonomi dan abolisi sanksi.

### **1.6.2 Keterbukaan Korea Utara**

Keterbukaan yang dimaksud penulis disini bukan berarti pernyataan bahwa Korea Utara telah meninggalkan isolasionismenya menjadi negara yang terbuka. Namun lebih kearah perubahan sikap yang dilakukan Korea Utara dari yang sebelumnya sangat bersikeras melakukan uji coba nuklir dan rudal balistik sehingga meninggikan ketegangan di semenanjung Korea. Tetapi pada tahun 2018 melunak ditandai dengan usaha normalisasi hubungan dengan Korea Selatan, kunjungan diplomatik Kim ke Tiongkok, serta perundingan bilateral dengan Amerika Serikat di Vietnam.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang berupaya untuk menemukan penjelasan mengenai mengapa suatu fenomena, masalah atau perilaku tertentu terjadi dengan menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Fokus utama penelitian ini adalah pencarian latar belakang perubahan sikap Kim Jong-un menjadi lebih terbuka.

### 1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2011 yaitu awal Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara hingga tahun 2018 ketika Kim Jong Un mengadakan perjalanan resmi menemui beberapa pemimpin negara berpengaruh

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen. Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah online, berita, artikel, dan laporan dari organisasi internasional.

### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menekankan pada adanya analisis data atau informasi.

## 1.8 Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Dinamika Relasi Amerika Serikat dan Tiongkok dengan Korea Utara
- BAB III : Implikasi Dinamika Relasi Amerika Serikat dan Tiongkok Terhadap Keterbukaan Korea Utara
- BAB IV : Kesimpulan